



Gita Setra

HIMBAUAN DARI DAN UNTUK LAPANGAN

ISSN : 0854 - 4956





Gita Utama,
Pemberdayaan Masyarakat
Mengatasi Krisis, 1

Gita Selingan,
Jender dan Kepentingannya
dalam Pembangunan, 14

Aneka Kegiatan,

- Pengalaman yang menge-
sankan naik subway, 25
- Pelatihan PB SKB dan
Penilik Diklusepora, 27
- Kerjasama BPKB Jawa
Barat dan Meneg PP, 29
- Berita Baru BPKB Jawa
Barat, 29



Penanggung jawab:
Kepala BPKB Jawa Barat

Pimpinan Redaksi:
Drs. Rustam Effendy

Sekretaris Redaksi:
Surono, S.Pd.

Dewan Redaksi:
Drs. Dadang Sudarman T
Merry Mariam, M.Pd.
Drs. Dadan Supriatna
Unus Nasrudin, S.Pd.
Drs. Benny Benyamin L
Paiman Umar

Illustrator:
Endang Djumaryana

Fotografer:
Parwoto

Distributor:
Edi Purwanto

Penerbit/Pencetak:
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN
BELAJAR (BPKB) JAWA BARAT
Jl. Jayagiri No. 63
Kec. Lembang Kabupaten Bandung
Kode Pos 40391
Telp. (022) 2786017,
Fax. (022) 2787474
e-mail: bpkb_jg@indo.net.id

Diproduksi dan diedarkan terbatas
dalam kalangan sendiri

Departemen Pendidikan Nasional
Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat
Tahun 2000

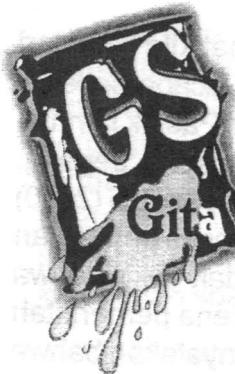


Di balik ramainya kalangan pelaku pemerintahan mempersoalkan otonomi daerah, masyarakat masih tetap mengap-mengap menghadapi krisis yang berdampak meluas ke semua aspek kehidupan. Sebagian masyarakat tidak berdaya menghadapi dampak krisis yang berkepanjangan. Baru disadari bahwa pemberdayaan masyarakat dirasakan penting dan strategik guna menyiapkan masyarakat menghadapi perubahan-perubahan. Berbagai pendekatan mengatasi krisis ditulis, dipublikasikan, diseminarkan dan dilatihkan ke berbagai lapisan masyarakat. Bulletin Gita Setra pun tak mau ketinggalan. Dalam edisi ini satu tip berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat kami sajikan.

Berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, baik peluang dan aksennya ke dalam pembangunan, kontrolnya atas pembangunan, serta perolehan manfaatnya atas hasil-hasil pembangunan, masih terjadi diberbagai bidang pembangunan. Hal ini telah sekian lama menjadi masalah struktural, terutama disebabkan oleh nilai-nilai budaya tradisional yang berkembang dalam sistem sosial dan berlaku pada berbagai tingkatan masyarakat menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan dan peran yang berbeda-beda. Demikianlah isue jender yang berkembang sampai saat ini, karenanya diperlukan pengarusutamaan jender yang pada tahap penyadaran kali ini sasaran utamanya adalah policy maker (pembuat kebijakan). Apa itu jender dan bagaimana implikasinya dalam pembangunan? Jawaban atas pertanyaan itu dapat Anda simak pada bulletin kita edisi ini.

Pembaca yang budiman, karena berbagai hal, bulletin Gita Setra pada tahun 2000 ini hanya terbit dua kali, yaitu edisi Juni dan Desember 2000. Demikian untuk diketahui dan dimaklumi adanya.

Redaksi.



Pemberdayaan Masyarakat Mengatasi Krisis

(*Suatu Kajian Teoritis Untuk
Difungsionalkan dalam Program-
program di Lapangan*)

Simpul-simpul Kekusutan kehidupan Berbangsa

Pemulihan ekonomi negara kita sebagai akibat dari krisis ekonomi dan moneter yang berlanjut pada krisis lainnya bahkan bersifat multidimensional yang sampai saat ini penanganannya masih sangat lambat. Para ekonom yang meramalkan dapat terjadinya *Teori V* pada negara kita sebagai akibat krisis belum terwujud. Teori V menyebutkan jika terjadi resesi yang tajam, maka akan terjadi pemulihan yang tajam pula. Hal ini baru terjadi pada kawasan Asia Pasifik pada umumnya, kecuali Indonesia. Kondisi ini menurut **Suhadi** (2000) selaku anggota Dewan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (PECC) menjadikan Indonesia sebagai *the sick man* di kawasan Asia Pasifik.

Lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia dapat kita lihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya dicapai sebesar 0,2 % pada tahun 1999, sedangkan kawasan Asia Pasifik lainnya rata-rata dapat mencapai 3,9 % seperti negara Hongkong, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Cina dan Thailand. **Hadi Soesastro (2000)** mengidentifikasi dua kemungkinan mengapa proses pemulihan ekonomi kita lambat. Pertama, karena pemerintah tidak yakin bahwa program yang ditentukan tidak baik atau kedua karena pemerintah tidak mampu melaksanakannya. Selanjutnya ia menyatakan bahwa faktor politik nampaknya sangat mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi ini.

Apabila pemulihan ekonomi ini tidak diusahakan penanganannya secepat mungkin, maka akan semakin buruk bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Data Indeks kualitas SDM menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan 105 dari 170 negara yang diteliti UNDP 1999, jauh berada di bawah negara-negara seperti Brunei Darussalam (25), Singapura (25), Thailand (67) dan Filipina (77).

Krisis ekonomi dan moneter telah mengakibatkan penurunan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat. Kemampuan orang tua dan masyarakat untuk membiayai pendidikan menurun, sehingga jumlah anak sekolah menurun, jumlah putus sekolah makin meningkat, pengangguran semakin meningkat dan daya beli masyarakat menurun. Keadaan ini sungguh ironis bagi negara Indonesia yang dijuluki bagi jamrut di khatulistiwa sudah hampir tiga tahun yang terhempas badai krisis ekonomi dan moneter masih belum pulih. Hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dan dibanggakan selama Orde Baru seolah-olah tanpa daya menahan terpaan badai krisis. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yakni gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), karena pabrik-pabrik dan sektor industri swasta banyak yang gulung tikar, investor-investor asing

menarik kembali modalnya, peluang kerja semakin sempit, daya beli masyarakat menurun akibat menurunnya pendapatan dan berbagai sendi kehidupan masyarakat mengalami kerosotan, termasuk semakin merajalelanya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba), minuman keras, perjudian, perlakukan seksual menyimpang serta makin rentannya terjadi konflik dan kerusuhan sosial.

Arah dari pemulihan ekonomi tiada lain adalah peningkatan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat agar terbebas dari belenggu kemiskinan. **Tjiptoherijanto** (1997) menyatakan upaya pengentasan kemiskinan saat ini jauh lebih sukar dibandingkan masa-masa sebelumnya, oleh karena sudah memasuki tahap *hard core*. Faktor-faktor yang sifatnya non-ekonomi amat diyakini turut memperlambat pemulihan ekonomi, seperti masalah konflik kepentingan dari para elit politik yang tiada kunjung berkesudahan. Untuk itu upaya yang perlu dilakukan tidak semata-mata pada kebijakan ekonomi, tetapi juga penyelesaian secara arif dan lapang dada dari para elit politik untuk lebih mengedepankan kepentingan kehidupan berbangsa secara utuh, bukan bagi kepentingan sektarian, parpol atau dirinya.

Pemberdayaan: Upaya Mengurai Simpul Kekusutan

Di balik krisis multidimensional sesungguhnya ada hikmah dan kearifan yang perlu kita tarik bagi pengambilan kebijakan pembangunan kita, yaitu untuk menata kembali kebijakan pembangunan yang lebih fundamental dan konsepsional. Pada akhirnya yang menjadi muara dari landasan di atas adalah upaya pemberdayaan masyarakat menuju terciptanya masyarakat madani Indonesia, yaitu masyarakat demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memahami keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi dan menegakkan hukum dan peraturan secara kuat.

Masyarakat madani Indonesia dapat terwujud apabila masyarakat selaku pelaku dan tujuan akhir pembangunan diberdayakan secara penuh. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu kultur yang mendukung bagi tumbuh-kembangnya proses pemberdayaan secara permanen. Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses kultur pemberdayaan adalah sebagai berikut ini (Muljani A. Nurhadi dkk, 1999).

1. *Usaha pengembangan manusia seutuhnya*, termasuk pengembangan keterampilan yang mampu beradaptasi dengan perubahan.
2. *Usaha pengembangan pendidikan masyarakat* yang dapat menumbuhkan perspektif historis, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang diyakini sangat dibutuhkan di dalam masyarakat madani Indonesia.
3. *Usaha pengembangan pendidikan untuk semua* melalui pemberdayaan dan penggunaan media komunikasi massa tradisional, cetak dan elektronika.

Wacana pemikiran di atas memiliki implikasi terhadap pengambilan kebijakan dan pengembangan pendidikan nasional dalam skala makro serta memiliki dimensi pendidikan dalam arti jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.

Makna atau pengertian pemberdayaan sesungguhnya banyak dikemukakan oleh para ahli dengan penekanan yang berbeda-beda. Pemikiran yang progresif tentang pemberdayaan ini menyatakan bahwa *selema*h apapun manusia pasti dalam dirinya ada kekuatan. Sedangkan makna kekuatan dapat berarti kekuatan: (a) kekuasaan, (b) kemampuan dan (c) potensi.

Dari beberapa konsepsi pemberdayaan, kita dapat simak pengertian dari Cornell University (1992), yaitu suatu proses yang disengaja dan terus menerus yang dipusatkan di dalam komunitas lokal, kepedulian dan menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian

dan partisipasi kelompok yang memungkinkan masyarakat yang merasa kurang memiliki akses terhadap sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.

Untuk mengembangkan konsepsi pemberdayaan **Jim Ife** (1995) mengemukakan beberapa strategi yang dapat ditempuh, antara lain:

1. pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan, dengan merubah struktur dan institusi yang ada,
2. pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, melalui aksi langsung dan,
3. pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran, yakni dengan proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan.

Selain strategi di atas dapat pula digunakan dengan strategi Community Organization, self Management and Collaboration, Participatory approach dan Education for Justice.

Sejalan dengan pemikiran **Jim Ife** di atas, **Ronald Lippit** (1958) mengemukakan tahapan dari proses pemberdayaan, sebagai berikut.

1. pengembangan kebutuhan akan perubahan (unfreezing),
2. pemantapan relasi perubahan,
3. melakukan perubahan (freezing),
4. generalisasi dan stabilisasi perubahan (refreezing),
5. terminasi.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam proses pemberdayaan dapat digunakan beberapa pendekatan berikut:

1. need oriented,
2. endogenous,
3. self reliance,
4. ecologically sound,
5. based on structural in information.

Allien Mitchell Stewart (1998) mengemukakan tentang bagaimana usaha kita untuk memberdayakan masyarakat.

1. Mengembangkan visi bersama.

Oleh karena hanya dengan dibangun visi dan tujuan-tujuan yang jelas seluruh staf, masyarakat dan komponen lain akan memusatkan energinya pada satu sasaran yang dibangun bersama.

2. Mendidik.

Selagi proses pemberdayaan berlangsung jangan lupa ciptakan suasana mendidik, baik secara internal dalam lingkungan kerja/ masyarakat maupun dengan mengikutkan pada berbagai pendidikan atau latihan di luar.

3. Menyingkirkan rintangan-rintangan.

Pemberdayaan hanya bisa optimal apabila segenap rintangan-rintangan sebisa mungkin dihilangkan atau dieliminir, sehingga tidak mengganggu.

4. Mengungkapkan.

Berilah kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anggota untuk mengungkapkan apa yang yang mengganggu bagi proses pemberdayaan

5. Menyemangati.

Berilah dorongan atau semangat kepada anggota agar bisa berbuat lebih banyak bagi kepentingannya dan masyarakat atau organisasi.

6. Memperlengkapi

Lengkapilah apa-apa yang diperlukannya bagi pelaksanaan kegiatan pemberdayaannya, semampu mungkin tetapi tidak mengada-ada.

7. Menilai

Berilah penilaian terhadap hasil yang dicapai, kemudian cobalah kemukakan cara-cara untuk memperbaikinya. Jauhkan sikap yang dapat mengecilkan semangatnya atau kekurangannya.

8. Mengharapkan

Berilah pengharapan yang realistik tentang tujuan-tujuannya sehingga terpupuk motivasinya untuk maju.

Kembali Ke Dasar :Pemberdayaan Sektor Pertanian

Berdasarkan paparan tersebut, manakala sektor industri dan jasa terhempas badai krisis ekonomi dan moneter, sektor pertanian merupakan salah satu pilihan yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan, sekaligus memperluas kesempatan kerja. Dalam kaitan ini **Gunawan Satari** (1999) mengemukakan lima orientasi strategi pemberdayaan sektor pertanian (1) berorientasi kepada pemberdayaan ekonomi petani khususnya dan masyarakat perdesaan umumnya, (2) berorientasi kepada pemanfaatan ketahanan pangan, (3) berorientasi kepada pasar dalam negeri maupun luar negeri, (4) berorientasi pada IPTEK sebagai ujung tombak peningkatan nilai tambah dan teknologi ramah lingkungan dan (5) berorientasi pada pendekatan industri pengelolaan yang menghasilkan produk olahan dalam bentuk yang banyak terdapat di pasar.

Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan sektor pertanian, **Gunawan Sumodiningrat** (1999), **Soetomo** (1990) dan **Korten** (1984) menyatakan harus berorientasi kerakyatan, atau **Chambers** (1987) menyebutnya dengan *pembangunan yang mulai dari belakang atau proses belajar terbalik*. Pengertian yang terkandung di dalamnya adalah bahwa program-program pemberdayaan sektor

pertanian harus menekankan pada pembangunan manusianya, selain pembangunan untuk meningkatkan produksinya, maka dalam perwujudan program-program pertanian yang disusun harus berorientasi pada realitas kondisi lapangan, bukan terjadi sebaliknya.

Pemberdayaan sektor pertanian yang berorientasi kerakyatan berarti menghidupkan perekonomian rakyat atau perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. **Gunawan Sumodiningrat** (1999) menyatakan perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat berarti bahwa perekonomian nasional berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Makna rakyat disini berarti seluruh warga negara (rakyat) berperan dalam pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peluang yang sama.

Strategi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pemberdayaan sektor pertanian yang berorientasi kerakyatan antara lain adalah dengan mendorong percepatan perubahan struktural yang memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ketergantungan ke kemandirian **Gunawan Sumodiningrat** (1999). Strategi ini harus didukung dengan adanya pengembangan kapasitas masyarakat (rakyat), yaitu dengan pemberian akses dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha dan pengembangan kegiatan sosial ekonomi produktif, pengembangan sumber daya manusia pelaksana dan masyarakatnya, pengembangan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal, penguatan kelembagaan serta pengembangan sistem pelestarian pembangunan mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat.

Pengembangan kapasitas masyarakat pada hakikatnya adalah upaya memberdayakan masyarakat. **Kindervarter** (1979) menya-

takan bahwa dalam proses pemberdayaan mencakup (1) proses pengorganisasian masyarakat, (2) proses manajemen diri sendiri dan bekerjasama, (3) proses pendekatan partisipatori dan (4) proses pendidikan dan keahlian.

Masyarakat petani dan nelayan yang merupakan komunitas terbanyak dari jumlah penduduk di Indonesia selama ini menjadi kelompok masyarakat yang relatif terpinggirkan sebagai akibat dari kebijakan pembangunan yang kurang memihak pada mereka. Telah diyakini bahwa kebijakan yang lebih mengandalkan *tetesan strategi pertumbuhan*, sepenuhnya tidak mengandung kebenaran, karena meskipun banyak negara berkembang telah berhasil mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti oleh golongan masyarakat pada umumnya, khususnya kelompok petani dan nelayan. Sehubungan dengan itu **Gunawan Sumodiningrat** (1995) mengemukakan strategi pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan, yang pada dasarnya mempunyai tiga arah (1) pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, (2) pemberian otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah dan (3) penajaman dan pemantapan arah dalam struktur sosial ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan kelompok petani dan nelayan merupakan suatu tuntutan untuk diwujudkan, dan dioptimalkan keberadaannya mulai dari kalangan orang dewasa, remaja baik perempuan maupun laki-laki, sehingga mereka yang sepantasnya memperoleh pemihakan dalam kegiatan usaha taninya.

Kelompok tani dan nelayan yang ada di perdesaan sesungguhnya merupakan tulangpunggung perekonomian rakyat yang harus diberdayakan potensinya. Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya tidak semata-mata pada bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu walaupun bidang ekonomi yang lebih dikedepankan, karena dapat diperoleh

manfaatnya secara langsung, tetapi bidang lain pun tidak boleh diabaikan.

Pemberdayaan Melalui Strategi Kelompok

Kelompok berarti kekuatan yang beroperasi dalam kelompok **Rusli Lutan** (1986). Pengertian ini diangkat dari kata dynamics yang berarti kekuatan atau daya. Studi tentang dinamika kelompok dianggap penting oleh karena beberapa pertimbangan berikut **Cartwright** (1971).

1. Kelompok dipahami sebagai sumber yang mempengaruhi anggotanya. Usaha untuk menciptakan perubahan dapat didukung atau dibendung oleh para anggotanya. Sehubungan dengan itu untuk tujuan konstruktif seperti pada program-program PLS, maka kelompok dimanfaatkan sebagai medium perubahan.
2. Kelompok sebagai target perubahan. Dalam kaitan ini yang dirubah misalnya norma kelompok, gaya kepemimpinan, suasana emosional dan stratifikasi dalam kelompok. Walaupun tujuan perubahan adalah individu, tetapi targetnya adalah kelompok.
3. Beberapa pola tingkah laku dianggap akan mengalami perubahan apabila dilakukan dengan usaha terorganisasi oleh suatu kelompok sebagai tenaga pengubah.

Dalam kaitan ini **Santoso** (1985), **Festinger** (1950) dan **Rusli Lutan** (1986) menyatakan beberapa prinsip umum dalam menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui kelompok.

1. Apabila kelompok dipergunakan secara efektif sebagai medium perubahan, orang-orang yang akan dirubah dan orang-orang yang menimbulkan pengaruh untuk berubah harus memiliki rasa diakui sebagai anggota kelompok yang kuat. Dengan kata lain jauhi kesenjangan antara pemimpin dan anggota atau antara sesama anggota.

2. Makin menarik suatu kelompok bagi para anggotanya, makin besar pengaruh yang dapat dikerahkan dari kelompok itu terhadap anggotanya. Festinger (1950) juga menyatakan bahwa makin kohesif suatu kelompok, maka makin meningkat kesiapan para anggotanya untuk mempengaruhi yang lain dan makin meningkat kesiapannya untuk dipengaruhi orang lain serta makin kuat tekanan ke arah konformitas apabila konformitas merupakan sesuatu hal yang relevan bagi kelompok.
3. Dalam ikhtiar untuk mengubah sikap, nilai atau perilaku, makin relevan mereka dengan hal yang menarik bagi kelompok, makin besar pengaruh yang dapat dipancarkan kelompok terhadap mereka. Jadi yang dipentingkan adalah bukan dimana seseorang itu berada dalam kelompok, tetapi sejauhmana kelompok itu tertarik baginya.
4. Makin besar prestise seseorang anggota suatu kelompok diantara anggota-anggota lainnya, makin besar pengaruh yang dapat dipancarkannya. Prinsip ini mengandung makna bahwa tidak selamanya seorang pemimpin (formal) memiliki pengaruh yang kuat dalam kelompok, tetapi justru seseorang anggota kelompok yang prestisinya kuat akan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pemimpin yang diangkat resmi.
5. Usaha-usaha untuk mengubah individu-individu atau bagian-bagian kecil dari sebuah kelompok, jika berhasil akan mengakibatkan perubahan perilakunya berupa penyimpangan dari norma kelompok. Penyimpangan itu mengalami resistensi yang kuat. Sikap non-konformis seseorang akan menimbulkan ketegangan dan perilaku agresif yang meningkat dalam kelompok dan ada kecenderungan untuk membentuk klik dengan anggota lainnya yang sepaham atau yang mudah dipengaruhi.
6. Tekanan yang kuat untuk perubahan dalam kelompok dapat diadakan dengan menciptakan urunan persepsi berupa kebu-

tuhan untuk berubah dari para anggotanya sehingga sumber perubahan terletak di dalam kelompok.

7. Informasi yang bertalian dengan kebutuhan untuk perubahan, perencanaan untuk perubahan dan akibat dari perubahan harus merupakan partisipasi dari semua orang yang relevan dalam kelompok. Dengan makin banyaknya arus komunikasi, maka makin menimbulkan konformitas dan terciptanya kebersamaan makna, yang merupakan hakikat dari komunikasi **Santoso (1985)**
8. Perubahan dalam satu bagian dari sebuah kelompok menghasilkan ketegangan dalam bagian lain yang bertalian, yang dapat dikurangi hanya dengan cara menghapuskan perubahan atau penyesuaian kembali dalam bagian-bagian yang bertalian.

Berdasarkan pada paparan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk terjadinya perubahan perilaku individu dalam kelompok maupun kelompok itu sendiri, tidak semata-mata karena luncuran programnya, tetapi juga karena pengaruh dari karakteristik kelompoknya.

Dalam kaitan di atas **Mosher (1976)** mengemukakan dua macam strategi bagi peluncuran program-program di lapangan, yaitu simultan dan terpadu. Simultan berarti pada setiap meluncurkan program hendaknya dibarengi dengan sejumlah kegiatan lain yang serempak atau berangkaian. Sedangkan faktor keterpaduan bisa berupa keterpaduan horizontal, dengan meluncurkan dua program atau lebih yang diluncurkan kedalam wilayah/kelompok sasaran yang sama dan keterpaduan vertikal, yaitu memasukan komponen atau program lokal ke suatu tingkat yang lebih tinggi, misalnya desa, kecamatan atau kabupaten.

Penutup

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk dan dalam masyarakat

guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam semua aspek kehidupannya (ekonomi dan non ekonomi) menuju masyarakat madani Indonesia. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan tersebut mengandung makna bahwa pembangunan masyarakat dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan, baik lingkungan alam, sosial maupun budaya.

Pemberdayaan masyarakat berarti pula menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat. Beberapa nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam pembangunan masyarakat antara lain gotong royong, kebersamaan, solidaritas, kesetiakawanan, tenggang rasa dan kepedulian sosial.

Nilai-nilai itu dikembangkan sesungguhnya mengarah pada terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang memiliki (a) kemampuan/capacity, kebersamaan/equity, kemandirian/sustainability dan kesalingtergantungan/interdependency. Dengan begitu pemulihian ekonomi negara kita akan lebih cepat. Semoga! ■(Safuri Musa, PB BPKB Jawa Barat, Mahasiswa S3 PLS UPI Bandung).





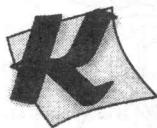
Gita Selingan

JENDER

dan Kepentingannya dalam Pembangunan

*(Tim Pengembangan Bahan
Informasi GMS BPKB Jawa
Barat)*

Pengantar



Osaka kata jender telah menjadi bagian dari peristilahan pembangunan. Kalimat seperti: "pembangunan berperspektif jender", "kesetaraan dan keadilan jender" atau kalimat lain yang terkait dengan itu seperti "pemberdayaan perempuan", pengarusutamaan jender dalam pembangunan" paling tidak menunjukkan bahwa jender telah menjadi isu dan wacana nasional dalam pembangunan. Namun demikian, disadari bahwa jender sebagai wacana ataupun pengertian dasar dari jender itu sendiri belum banyak dipahami, operasional. Sehingga menimbulkan banyak penafsiran dan respon yang tidak proporsional tentang jender. Umumnya jender

baru hanya ditafsirkan atau dikaitkan dengan kepentingan kaum perempuan dan sesuatu yang menyangkut dengan kodrat perempuan.

Pemahaman tentang jender dan aspek lainnya yang terkait dengan jender menjadi penting, karena jender telah menjadi salah satu arus utama (mainstream) yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pembangunan di setiap bidang dan sektor. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi awal berupa kata-kata kunci sehingga diharapkan dapat membantu memahami pengertian dasar jender secara proporsional. Sumber utama ini adalah paket bahan informasi (modul) yang dikembangkan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja-sama dengan BPKB Jawa Barat.

Pengertian

Pembahasan tentang jender akan terkait dengan beberapa istilah dan aspek berikut:

- jenis kelamin (seks);
- kesetaraan dan keadilan jender;
- aspek indikator jender: akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol dan benefit atau manfaat
- gender mainstreaming atau GMS

Berikut ini dijelaskan pengertian dasar dari istilah dan aspek tersebut.

1. Jender

Jender adalah pembagian peran serta tanggungjawab baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan atau dibentuk oleh masyarakat maupun budaya. Jender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu jender berkaitan dengan proses

keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berada.

2. Jenis Kelamin (Seks)

Adalah pembagian jenis kelamin yang terdiri dari perempuan atau laki-laki, betina atau jantan, yang telah ditentukan oleh Tuhan atau juga disebut kodrat Tuhan, oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah. Misalnya laki-laki memiliki sperma, penis dan jakun, sedangkan perempuan mempunyai rahim, vagina, indung telur, yang semua itu adalah kodrat Tuhan. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, sekarang, dan akan berlaku selamanya, tidak akan dapat diubah-ubah.

Jenis kelamin adalah perbedaan biologis hormonal dan patologis antara perempuan dan laki-laki. Jender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat.

Dengan demikian :

JENIS KELAMIN (SEKS)	JENDER
Tidak dapat berubah	Dapat berubah
Tidak dapat dipertukarkan	Dapat dipertukarkan
Berlaku sepanjang masa	Tergantung waktu
Berlaku dimana saja	Tergantung budaya setempat
Merupakan kodrat Tuhan	Bukan merupakan kodrat Tuhan
Ciptaan Tuhan	Buatan manusia

Pembagian jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta pembagian peran serta tanggungjawab secara jender telah berjalan dari tahun ke tahun, bahkan dari abad ke abad, sehingga lama

kelamaan masyarakat tidak lagi dapat mengenali mana yang seks mana yang jender. Peran jender bahkan oleh masyarakat kemudian diyakini seolah-olah merupakan kodrat Tuhan.

3. Kesetaraan dan Keadilan Jender

Kesetaraan jender berarti kesamaan kondisi untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan hankamnas, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan jender juga meliputi penghapusan diskrimansi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan jender adalah suatu kondisi dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan jender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

4. Aspek Indikator Jender

Dengan kesetaraan jender berarti tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki *akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol* atas pembangunan serta memperoleh *manfaat* yang setara dan adil dari pembangunan.

Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

□ Kewenangan akses, kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan wewenang untuk mengambil keputusan terhadap

- cara penggunaan dan hasil dari sumberdaya tersebut.
- Peran serta, kesempatan dan kewenangan untuk mengambil keputusan dalam berpartisipasi sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.
 - Penguasaan, kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil pendayagunaan dari sumberdaya.
 - Pemanfaatan, kesempatan dan kewenangan untuk memutuskan atas manfaat yang dihasilkan dari program atau proyek yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepadanya.

5. Gender Mainstreaming (GMS)

a. Batasan

Meskipun istilah *gender mainstreaming* menjadi kosa kata standar dalam kamus pembangunan, akan tetapi masih belum jelas apa yang dimaksud dengan *gender mainstreaming*. Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan definisi untuk gender mainstreaming yang dalam terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

GENDER merupakan suatu dimensi yang harus diintegrasikan ke dalam semua kebijakan, rancangan dan proses pembangunan, pemahaman tentang gender dapat memahami lebih baik tentang sikap, kebutuhan, dan peranan perempuan dan laki-laki, dilihat dari faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dengan demikian gender harus dianggap sebagai bagian dari analisis umum suatu kebijakan, program, kegiatan maupun proses. Gender seharusnya menjadi suatu arus utama dan bukan sebagai isu yang terpisah (United Nation, 1997).

Perspektif gender merupakan suatu proses penyetaraan bagi perempuan dan laki-laki pada berbagai pelaksanaan, kegiatan, misalnya dalam pembuatan undang-undang,

kebijakan, atau program di berbagai bidang dan setiap tingkatan. Gender mainstream dianggap strategis untuk membuat perempuan dan laki-laki mempunyai perhatian dan pengalaman tentang dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan-kebijakan dan program disemua bidang, sehingga peran perempuan dan laki-laki itu sama dan ketidaksetaraan perempuan semakin berkurang. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

ILO menafsirkan gender mainstreaming sebagai berikut :

Mainstreaming merupakan proses integrasi kesetaraan untuk melaksanakan semua tujuan dan kegiatan program ILO. Tujuannya untuk meningkatkan kesetaraan perempuan dalam pekerjaan. Strategi mainstreaming menghendaki pengenalan analisis dan perencanaan gender disemua kegiatan ILO. Strategi ini juga menghendaki identifikasi dampak proyek dan program yang berlainan terhadap perempuan dan laki-laki serta kelengkapan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa kegiatan-kegiatan ILO berdampak positif terhadap kesetaraan gender.

Beberapa kata kunci Gender Mainstreaming:

- Untuk mencapai kesetaraan jender
- Mengadopsi perspektif jender karena memperhitungkan adanya dampak dari peran jender dan hubungan jender terhadap ketidaksetaraan perempuan;
- Mengintegrasikan perihal jender ke dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan, program-program, proyek-proyek, aktivitas-aktivitas (pembangunan)
- Mengintegrasikan perihal jender ke dalam agenda pembangunan;
- Memasukkan gender framework ke dalam rancangan dan implementasi perencanaan dan program

- Membuat mainstream agar lebih mudah diterima dan kondusif untuk jender dan tujuan-tujuan pembangunan.

Dua tugas utama Gender Mainstream

- Mempengaruhi kebijaksanaan
- Mengintegrasikan perihal perspektif jender ke dalam siklus perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

b. Tujuan

- Sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam rangka reorientasi berbagai metode untuk lebih memantapkan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan proses perubahan program pemberdayaan perempuan.
- Menyebarluaskan dan mengintroduksi gender mainstreaming pada semua lingkup sektor, baik pusat dan daerah dalam semua aspek pembangunan.
- Adanya satu pintu dalam kebijakan, program, manajemen sumberdaya manusia, pembiayaan dan pengadministrasian program pemberdayaan perempuan.

Mengingat upaya gender mainstreaming merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan dalam menyusun suatu program atau kegiatan sejak dari kegiatan perencanaan, penetapan kebijakan atau berbagai keputusan di semua tingkat, maka perlu memasukkan analisis tingkat kesetaraan laki-laki dan perempuan yang telah dicapai dalam menjaga Pembangunan Manusia yang berkelanjutan. Dengan memasukkan analisis gender dalam berbagai kegiatan pembangunan di semua tingkat, maka diharapkan dapat diselenggarakan suatu jaringan kerjasama, yaitu:

- Peningkatan efektifitas koordinasi pemberdayaan perempuan

- Reposisi dan reformasi kegiatan pemberdayaan perempuan di semua tingkatan
- Penguatan kerjasama berbagai institusi pemerintahan maupun non pemerintah dalam pemberdayaan perempuan

Jender dalam Pembangunan Bangsa

1. Batasan

Jender dalam pembangunan bangsa, merupakan strategi global yang berupaya meningkatkan kepedulian akan aspirasi, kepentingan dan peranan laki-laki dan perempuan dengan tetap memperhatikan kodrat, harkat dan martabat perempuan dan laki-laki di segala bidang.

Pemikiran tentang peran kemasyarakatan berdasarkan laki-laki dan perempuan (jenis kelamin) dalam sosiologi disebut peran jender. Asal usul pembangunan peran tersebut diajukan berdasarkan beberapa teori. Dalam kerangka besar teori tersebut disebut teori nature dan nurture. **Teori yang pertama** lebih dikenal dengan tatanan yang dibuat oleh Tuhan yang tidak dapat berubah sampai kapanpun. Yang kita kenal ialah manusia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan yang masing-masing mempunyai kodrat. Perempuan haid, hamil, melahirkan serta menyusui anak dengan ASI dan laki-laki mempunyai sperma dan jakun.

Teori kedua menyebutkan bahwa perbedaan peran merupakan tatanan sosial yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat yang keadaannya berbeda-beda, tidak tetap dan dapat berubah-ubah. Hal tersebut disemua daerah Indonesia tidak dapat diseragamkan. Dalam mengkaji masalah jender, timbul pertanyaan, mengapa terdapat perbedaan jender (gender) antara laki-laki dan perempuan yang mengarah kepada pandangan diskriminatif yang umumnya dialami oleh perempuan? Tertinggalnya perempu-

an dalam pembangunan menjadi keprihatinan dan kepedulian dunia.

2. Pendekatan

Hakikat peningkatan peranan perempuan adalah meningkatkan kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian dan ketahanan mental spiritual perempuan. Upaya pembangunan untuk mewujudkan hakikat tersebut dilakukan melalui 2 pendekatan seperti berikut :

- a. Perempuan dalam pembangunan atau women in development (lazim disingkat dengan PDP atau WID): merupakan pendekatan melalui program/proyek khusus bagi perempuan. Pendekatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan praktis perempuan, disamping bertujuan memberdayakan perempuan agar meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari laki-laki. Dengan bekal kemampuan dan kemandirian ini, diharapkan perempuan akan lebih mampu mengaktualisasikan diri serta meningkatkan kedudukan dan peranannya. Dengan begitu, perempuan dapat berdiri sama tinggi dengan laki-laki dalam kemitrasejajaran yang harmonis.
- b. Jender dan pembangunan atau gender and development (GAD) : jender dan pembangunan merupakan pendekatan yang bertujuan mengintegrasikan aspirasi, kepentingan serta peranan laki-laki dan perempuan dalam arus pembangunan. Dalam tipe pendekatan ini perempuan tidak boleh lagi disubordinasikan, dipinggirkan (dimarginalisasikan), dilecehkan dan memikul beban yang berlebihan (overburden). Perempuan dan laki-laki secara bersama-sama dalam persamaan dan kesamaan menjadi subjek dan sekaligus objek pembangunan dalam kemitrasejajaran yang harmonis.

Hasil dari kedua pendekatan harus bermuara kepada makin meningkatnya kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian, dan ketahanan mental spiritual perempuan.

Kesadaran tentang peranan perempuan mulai berkembang pada dasawarsa 70-an, yang diwujudkan dalam arah pendekatan program yang memusatkan pada masalah "Perempuan Dalam Pembangunan" atau "Women in Development (WID)". Pendekatan ini memusatkan pada perempuan selaku pelaku dan sasaran program, terpusat untuk mengejar ketertinggalan perempuan.

Pandangan yang sempit ini kurang disadari keterkaitan antara kondisi perempuan dengan lingkungan ia berada. Wawasan tentang peranan perempuan, semakin luas dan terbuka dalam dasawarsa 90-an melalui pendekatan yang disebut "Jender dan Pembangunan" atau "**Gender and Development (GAD)**". Dalam hal ini, peranan perempuan dilihat secara holistik dalam hubungan kemitrasejajaran yang hamonis dengan laki-laki.

Pendekatan "Jender dan Pembangunan" lebih memusatkan kepada isu jender dan tidak melihat pada masalah perempuan semata. Akhir-akhir ini terhadap kecenderungan untuk lebih membicarakan "Jender dan Pembangunan" daripada "Perempuan Dalam Pembangunan". Namun kedua pendekatan tersebut masih perlu dilaksanakan sejauh permasalahan perempuan masih banyak terdapat dalam masyarakat/ keluarga.

c. Dampak Perempuan Dalam Pembangunan (WID) hanya terhadap perempuan saja, sedangkan dampak Jender dan Pembangunan tertuju pada laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya konsep jender memfokuskan kepada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan setempat, bukan perbedaan berdasarkan biologisnya.

PERBEDAAN ANTARA WID DAN GAD

PENDEKATAN	Pandangan bahwa yang menjadi sumber permasalahan ada pada perempuan	Pandangan yang menganggap bahwa sumber permasalahan ada pada pembangunan
FOKUS	Perempuan	Pola relasi perempuan-laki-laki
MASALAH	Tidak berperan-sertanya perempuan (separuh sumber-daya produktif) dalam proses pembangunan	Ketidaksejajaran hubungan kekuasaan (kaya-miskin, laki-laki, perempuan) menyebabkan berlangsungnya pembangunan yang tidak adil dan tidak berperansertanya perempuan secara maksimal
TUJUAN	Pembangunan yang lebih efektif dan efisien	Pembangunan yang adil dan berkesinambungan dengan perempuan dan laki-laki sebagai pengambil keputusan.
PEMECAHAN	Mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat perempuan yang terpinggir/marginal • Mengubah pola-pola hubungan-hubungan yang tidak sejajar
STRATEGI	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan proyek khusus untuk perempuan • Proyek-proyek terpadu • Meningkatkan produktivitas perempuan • Meningkatkan pendapatan perempuan • Meningkatkan keterampilan perempuan dengan mengurus rumah tangga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kebutuhan praktis sebagaimana didefinisikan oleh perempuan dan laki-laki untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. • Bersamaan dengan itu ditangani juga kebutuhan strategis perempuan • Menangani kebutuhan strategis golongan ekonomi lemah melalui pembangunan untuk rakyat



Aneka Kegiatan

Pengalaman mengesankan

NAIK SUBWAY

P

ada saat pembekalan, Pak Danu bilang, jangan lewakan kesempatan untuk mencoba *Subway*, kereta api cepat bawah tanah. Setelah mandi dan ganti baju, aku memprovokasi teman-teman untuk memanfaatkan waktu senggang yang kita miliki untuk mencoba *subway*. Ibu Santi yang sudah pandai bahasa *Honju*, kita tunjuk sebagai guide perjalanan kita. Setelah makan siang di ICTC kami diantar bis KOICA (Korea International Cooperation Agency) meluncur ke stasiun terdekat yaitu *YangJae*. Perjalanan dari gedung ICTC (International Cooperation Training Center) ke stasiun *Yangjae* di tempuh ± 25 menit.

Dengan berjalan beriringan kami berenambelas memasuki stasiun bawah tanah. Di depan loket penjualan tiket, Ibu Santi meminta kami

untuk menyetor uang 500 won. Kami semua lesu bayar masing-masing.

Ingat pesan Pak Direktur? Ini pesannya: "Kita harus menjaga kekompakan, harus saling tolong tapi tidak boleh merepotkan teman dalam hal keuangan". Setelah 16 buah tiket dibagikan, kamipun mulai masuk stasiun melewati lorong check tiket untuk menuju Pasar *Tongdaemun*. Kampungan aku, aku masuk saja tanpa memasukan kartu ke lobangnya. Anehnya lagi aku bisa lewat, padahal (katanya) pintunya akan tetap terkunci kalau tiketnya tidak dimasukkan.

Teringat pada pesan Mr. Park di tanah air, bahwa tiket itu tidak boleh hilang, dan kalau hilang kita tidak bisa keluar dari stasiun. Maka aku pegang erat-erat di tangan. Terbayang kalau aku tidak bisa keluar dari stasion, wow ... malunya negeriku.

Mungkin karena pertama kali, perjalanan ku naik subway, sungguh tidak bisa kunikmati. Kereta begitu cepat lajunya namun selalu berhenti di setiap stasiun dan selalu saja banyak orang yang naik dan turun. Setelah 30 menit perjalanan Ibu Santi minta kami untuk turun. Kembali kami beriringan mengikutinya kemana dia pergi. Entah berapa lama kita berjalan, karena Ibu Santi juga selalu bertanya dan bertanya kepada orang Korea, akhirnya kami sampai di stasiun biru. Kurang lebih 3 menit kami menunggu dan keretapun datang. Ibu Santi bilang, kita akan berhenti di stasiun berikutnya. Jadi aku tidak berusaha mencari tempat duduk, ikut-ikutan orang Korea bergelayutan di kereta.

Kali kedua inilah aku agak menikmati perjalanan dengan subway. Kuedarkan mataku, mencoba mencari pemandangan yang menarik. Rasanya biasa-biasa saja, kecuali jarang sekali atau hampir tidak ada orang yang ngobrol dengan seru sehingga mengganggu orang lain di dekatnya. Rata-rata mereka membaca buku atau tidur.

Kuperhatikan orang-orang satu gerbong denganku, hampir semuanya masih muda, tidak ada orang tua atau anak-anak. Kulit mereka putih bersih, ramping langsing dengan rambut yang agak kemerah-merahan.

Satu hal yang seragam, semuanya memakai kalung dengan liontin handphone kecil yang pasti ringan. Rupanya handphone sebagai alat komunikasi sudah merupakan barang umum dan biasa di Korea.

Kembali kita berjalan beriringan lagi mencari jalan keluar. Disini aku kembali berlaku konyol. Ketika keluar dari stasiun, kita harus

Kembali kita berjalan beriringan lagi mencari jalan keluar. Disini aku kembali berlaku konyol. Ketika keluar dari stasiun, kita harus memasukan kembali karcis, baru pintu akan terbuka. Setelah keluar aku tidak terus berlalu tapi terus saja berdiri di tempat karcis keluar, menunggu karcis ku kembali.

Tapi orang Korea di belakangku menggerak-gerakan tangannya supaya aku berjalan. Dengan isyarat aku menunjuk mesin kartu padanya, dan dia membalas dengan isyarat gerakan tangan ke bawah. Yah ... aku mengerti. Mesin itu telah memakan kartuku dan tak akan kembali lagi.

Dengan menahan senyum aku berjalan ke luar. Sambil menunggu teman lainnya tanpa sengaja aku melihat beberapa pemuda melompati pintu keluar tanpa memasukan tiket. Dalam hati aku berkata, dimana-mana sama, ada saja orang yang tidak disiplin dan bertingkah aneh. Kita dengan sabar antri menunggu giliran dan membeli karcis, eeh dia enak-enak saja melompati jalan keluar. ■(Merry Mariam, M.Pd, peserta The 2000 KOICA TRAINING COURSES IN SOUTH KOREA, 5 - 20 Juni 2000)

Pelatihan PB SKB dan Penilikan Diklusepora Terpadu

Dalam rangka membantu SKB menuju otonomi daerah, BPKB Jawa Barat telah melaksanakan pelatihan dan lokakarya (pentaloka) bagi para Kepala SKB di Jawa Barat tentang revitalisasi peran SKB pada penerapan otonomi daerah. Melalui pentaloka ini telah dihasilkan dua strategi dasar bagi SKB dalam mengantisipasi tunutan otonomi daerah.

Kedua strategi dasar tersebut merupakan produk kebijakan di tingkat Kepala SKB. Kebijakan ini akan efektif sebagai upaya antisipatif dan proaktif terhadap implikasi penerapan otonomi daerah jika dikonkretkan dalam bentuk program operasional.

Dalam rangka itulah BPKB Jawa Barat menyelenggarakan pelatihan PB SKB dan Penilik Diklusepora terpadu, dengan harapan peserta sebagai pelaksana teknis dapat mengoperasionalkan strategi revitalisasi SKB dalam menyongsong otonomi daerah dalam bentuk program konkret. Untuk itu keluaran yang diharapkan dalam pelatihan ini adalah:

- a. Kerangka kerja koordinatif antara PB SKB dan Penilik Diklusepora masing-masing lokasi.
- b. Rencana kerja pengelolaan Pusat Pelayanan Informasi Kegiatan PLS, berupa:
 - Proposal pengelolaan Pusat Pelayanan Informasi Kegiatan PLS
 - Jadwal kegiatan pengelolaan Pusat Pelayanan Informasi Kegiatan PLS
 - Peran dan Pemeran pengelolaan Pusat Pelayanan Informasi Kegiatan PLS
- c. Instrumen pengelolaan Pusat Pelayanan Informasi Kegiatan PLS.

Peserta pelatihan terdiri atas 52 PB SKB dan 78 Penilik Diklusepora se Jawa Barat yang terbagi ke dalam 2 (dua) angkatan. Selama proses pelatihan yang menggunakan pendekatan pentaloka peserta aktif berdiskusi dan bekerja kelompok untuk menghasilkan keluaran-keluaran di atas.

Dan untuk menambah wawasan peserta, mereka di ajak mengunjungi LPK Aryanti dan Gedung Merdeka untuk melihat dan berwawancara secara langsung mengenai pengelolaan dan penyebaran informasi yang telah dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.

Kerjasama BPKB Jabar dengan Kantor Meneg PP

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang dikomandan Ibu **Khofifah Indarparawangsa** memberikan kepercayaan kepada BPKB Jawa Barat untuk menyusun *Bahan Informasi dan Panduan Perencanaan Gender Mainstreaming (GMS)*. Menurut Chadir, salah satu asdep di Meneg PP, selaku koordinator kegiatan ini, mengatakan bahwa *Bahan Informasi dan Panduan Perencanaan Gender Mainstreaming (GMS)* ini diharapkan menjadi payung bagi kegiatan mainstreaming Gender di sektor-sektor terkait.

Bahan yang disusun terdiri dari dua paket, yakni empat modul bahan informasi dan satu Panduan Perencanaan GMS. Untuk mengukur tingkat keterbacaan dan kelayakan penerapan *Bahan Informasi dan Panduan Perencanaan Gender Mainstreaming (GMS)* ini, dilakukan uji coba di empat propinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Sasaran ujicoba adalah pejabat di tingkat Kabupaten/Kota yang terliput pada MEJAH (**M**enpower= Dinas Tenaga Kerja, **E**ducation= Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, **J**ustice= Kehakiman, **A**griculture= Dinas Pertanian dan **H**ealth= Dinas Kesehatan)

Berita baru BPKB Jawa Barat

Anda ingin berkomunikasi dengan BPKB Jawa Barat, kini fasilitas kami bertambah, Anda selain dapat berkomunikasi lewat pesawat telepon (022-2786017) atau melalui Faximile (022-2787474) kini Anda dapat berhubungan melalui **INTERNET** dengan alamat e-mail kami bpkb_jg@indo.net.id . Silakan Anda menghubungi kami di alamat tersebut.



DISTRIBUSI

DOEL DALI

ENDANG DJ.

